

PENDEKATAN STRUKTURAL, EKONOMI DAN SPASIAL (ALMIRAL) SEBAGAI MODEL ALTERNATIF PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Dwi Eko Waluyo

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surakarta

E-mail: dewaumm@yahoo.com

Abstract

The research was conducted to develop an integrated model of poverty reduction based on spatial aspects, economic areas, structural, and administrative of East Java province. The research applied some analysis tools which include: Analysis of dominant sectors, supporting capacity analysis, Analytical Hierarchy Process (AHP), and qualitative descriptive method. The results showed that Bangkalan, Lamongan, Bojonegoro, and Batu had the highest number of very poor population due to some factors such as the low income of population, low levels of education, and poverty that were passed down by the family. Poverty reduction efforts through institutional capacity optimization has greatly intensified and running well, yet the constraints arise from other instruments such as the adequacy of programs, activities, and funding that has not been managed properly.

Keywords: *Poverty, Structural, Economic and Spatial Approach, Poverty factor*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun sebuah model yang terintegrasi penanggulangan kemiskinan berdasarkan aspek spasial, daerah ekonomi, struktural dan administratif Propinsi Jawa Timur. Alat analisis meliputi: Analisis sektor unggulan, analisis daya dukung, Analytical Hierarchy Process (AHP), dan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah yang memiliki penduduk relatif miskin sangat tinggi yaitu Bangkalan, Lamongan, Bojonegoro dan Kota Batu. Faktor terbesar penyebab rumah tangga miskin di Jawa Timur adalah berpenghasilan rendah, pendidikan rendah, dan keturunan. Kapasitas kelembagaan untuk mengurangi kemiskinan sudah bekerja dengan baik. Akan tetapi, belum disertai dengan instrumen lain seperti kecukupan program, kegiatan dan pendanaan.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Struktural, Ekonomi dan Pendekatan Tata Ruang, Faktor Kemiskinan*

Perencanaan, penentuan sasaran, dan kriteria miskin serta pengaturan teknis pelaksanaan program penanggulangan

kemiskinan yang dilakukan selama ini oleh pemerintah atau instansi terkait seringkali bersifat terpusat (top-down), sehingga pro-

gram tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau daerah tertentu. Sehingga banyak program penanggulangan kemiskinan yang menempatkan masyarakat sebagai obyek, akibatnya masyarakat kurang berpartisipasi secara aktif dalam menggali potensi dirinya dan lingkungannya untuk keluar dari kemiskinan.

Selain itu program-program yang dilaksanakan cenderung bersifat sektoral yang sering kali mengakibatkan adanya semangat ego-sektoral dan saling tumpang tindih. Keadaan ini lebih dipersulit karena umumnya tiap departemen atau instansi mempunyai definisi dan kriteria sendiri tentang kemiskinan. Akibatnya kemiskinan cenderung dipahami secara parsial, dan penanggulangannya cenderung bersifat sektoral. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya menjaga kontinuitas program dan cenderung membuat program baru, dimana program baru tersebut bukan merupakan kelanjutan program lama.

Berangkat dari kegagalan dari program penanggulangan kemiskinan sebelumnya, maka diperlukan strategi atau model program penanggulangan yang kemiskinan yang pada prinsipnya menjadikan masyarakat miskin sebagai subyek. Untuk itu diperlukan model yang bisa: *pertama*, mendidik masyarakat miskin untuk terus menerus menemukan potensi yang dimiliki baik individu, keluarga, maupun lingkungan (keterampilan, material, dan sumberdaya alam) sebagai modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sehingga dengan mengenali potensi tersebut, akan mendorong tumbuhnya rasa percaya diri mereka akan kemampuannya untuk lepas dari belenggu kemiskinan. *Kedua*, model tersebut juga harus mampu menyadari bahwa tidak akan ada seseorang/lingkungan yang dapat keluar dari

kemiskinan, melainkan atas usaha orang/keluarga/lingkungan itu sendiri serta memberikan pemahaman bahwa masalah penanggulangan kemiskinan merupakan tugas dan tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat tajam setelah tahun 1998 atau setelah terjadinya krisis ekonomi. Krisis ekonomi menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan, bahkan sekurang-kurangnya 88% rumah tangga miskin mengalami penurunan pendapatan riil karena mereka mengaku pendapatan nominal mereka sama atau menurun dibanding 6 bulan sebelumnya. Data di atas juga menunjukkan bahwa provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak sampai tahun 2001 adalah Provinsi Jawa Timur. Jumlah penduduk miskin Jawa Timur mengalami peningkatan yang sangat pesat setelah terjadi krisis dibanding provinsi-provinsi lain.

Berangkat dari kondisi inilah maka Jawa Timur perlu mencari strategi yang jitu atau model yang tepat dalam penanggulangan masyarakat miskin. Karena berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) sampai akhir tahun 2004 Jawa Timur masih termasuk propinsi yang paling banyak jumlah penduduk miskinnya.

Kemiskinan menurut Sharp (1996), dari sisi ekonomi penyebabnya dibagi menjadi tiga yaitu: *Pertama*, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidak samaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya alam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. *Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumberdaya manusia. kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya

rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. *Ketiga*, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam akses modal.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan telah banyak dilakukan di Indonesia, salah satunya dilakukan oleh Sumarto (2002) dari SMERU Research Institute. Penelitian ini melakukan studi pada 100 desa selama periode Agustus 1998 hingga Oktober 1999. Berdasarkan hasil studi tersebut ada beberapa hal yang menjadi temuan berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan antara lain: a) Terdapat hubungan negatif yang sangat kuat antara pertumbuhan dan kemiskinan; b) Pertumbuhan tidak mengurangi kemiskinan secara permanen. Walaupun terjadi pertumbuhan dalam jangka panjang selama periode sebelum krisis, banyak masyarakat yang tetap rentan terhadap kemiskinan; c) Pertumbuhan secara kontemporer dapat mengurangi kemiskinan. Sehingga pertumbuhan yang berkelanjutan penting untuk mengurangi kemiskinan; d) Memberikan hak atas properti dan memberikan akses terhadap kapital untuk golongan masyarakat miskin dapat mengurangi kesenjangan, merangsang pertumbuhan, dan mengurangi kemiskinan.

Pengalaman di negara-negara Asia menunjukkan berbagai model mobilisasi perekonomian pedesaan untuk memerangi kemiskinan, yaitu: *Pertama*, mendasarkan pada mobilitas tenaga kerja yang masih belum didaya gunakan (*idle*) dalam rumah tangga petani gurem agar terjadi pembentukan modal di pedesaan (Nurkse, 1953). Tenaga kerja yang masih belum didaya gunakan pada rumah tangga petani kecil dan

gurem merupakan sumberdaya yang tersembunyi dan potensi tabungan. Alternatif cara untuk memobilisasi tenaga kerja dan tabungan pedesaan adalah: 1) menggunakan pajak langsung atas tanah, seperti yang dilakukan di Jepang. 2) dilakukan dengan menyusun kerangka kelembagaan di pedesaan yang memungkinkan tenaga kerja yang belum didayagunakan untuk pemupukan modal tanpa perlu menambah upah. Ini persis yang dilakukan Cina yang menerapkan sistem kerjasama kelompok dan *brigades* ditingkat daerah yang paling rendah (*communes*).

Model *kedua*, menitik beratkan pada tranfer daya dari pertanian ke industri melalui mekanisme pasar (Fei & Gustav, 1964). Ide bahwa penawaran tenaga kerja yang tidak terbatas dari rumah tangga petani kecil dapat meningkatkan tabungan dan formasi modal lewat proses pasar. Pengalaman Taiwan menyajikan contoh yang baik atas mobilisasi sumber daya dari sektor pertanian mengandalkan mekanisme pasar, tanpa menggunakan instrumen pajak seperti yang dilakukan oleh Jepang.

Model *ketiga*, menyoroti pesatnya pertumbuhan dalam sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi dan kemungkinan sektor yang memimpin (Mellor, 1976), Model ini dikenal dengan nama Model Pertumbuhan Berbasis Teknologi, atau *Rural-Led Development*. Proses ini akan berhasil apabila dua syarat berikut terpenuhi: 1) kemampuan mencapai tingkat pertumbuhan output pertanian yang tinggi; 2) proses ini juga menciptakan pola permintaan yang kondusif terhadap pertumbuhan.

Model *keempat*, menyoroti dimensi spasial dalam menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan bisa diatasi dengan cara kemudahan dalam mengakses dua bidang,

yaitu: 1) bidang ekonomi dan 2) bidang sosial (Kuncoro, 2004). Akses dalam bidang ekonomi dibagi menjadi dua yaitu: akses terhadap lapangan kerja dan akses terhadap faktor ekonomi. Akses terhadap faktor produksi terdiri dari: 1) Kemudahan masyarakat dalam mengakses modal usaha, 2) kemudahan masyarakat dalam mengakses pasar, 3) kemudahan masyarakat dalam kepemilikan modal.

Beberapa program pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun bantuan donor antara lain telah dilaksanakan melalui program: Impres Desa Tertinggal (IDT) dan dimantapkan melalui program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT). Program dilanjutkan dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE), dan Program Pengembangan Kawasan Desa-Kota Terpadu atau *Pov-erty Alleviation Through Rural Urban Linkage* (PARUL). Akan tetapi, program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Indonesia masih bersifat parsial.

Sebenarnya perbedaan antara pendekatan “top-down” dan “bottom up” tidak perlu terjadi apabila sistem politik nasional dan terutama lokal mampu menciptakan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakatnya. Ketiadaan mekanisme akuntabilitas selain membuat pihak eksekutif dan legislatif kurang tanggap terhadap keluhan masyarakatnya, juga membuat masyarakat tersebut tidak terlalu peduli atas kualitas layanan publik yang diterimanya ataupun terhadap kebijakan perekonomian daerahnya.

Metode Penelitian

Kegiatan penyusunan model penanggulangan masyarakat miskin dengan melakukan survei di seluruh wilayah yang termasuk dalam wilayah Jawa Timur yang menjadi sampel penelitian, yang terdiri dari Kabupaten Bojonegoro, Bangkalan, Jember, dan Kota Batu.

Adapun aspek yang digunakan untuk membangun model penanggulangan kemiskinan ada tiga aspek yaitu: 1) Struktural atau Kelembagaan, 2) Aspek Ekonomi, dan 3) Aspek Spasial (wilayah). Data yang digunakan yaitu data sekunder dan primer.

Studi ini menggunakan beberapa alat analisis untuk menjawab tujuan dan menghasilkan output sesuai sasaran/target. Alat analisis tersebut meliputi: 1) Location Quotient (LQ), 2) *Shift-Share (S-S)*; 3) Kontribusi sektoral, 4) Scalogram, 5) Analisis Sarana dan Prasarana, 6) *Analytical Hierarchy Process (AHP)*, 7) *Performance-Importance Analysis*; dan 8) Diskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan data makro ekonomi Jawa Timur, menunjukkan bahwa daerah yang paling banyak jumlah penduduk miskinnya pada tahun 2010 adalah Kabupaten Sampang, yaitu sebanyak 508.140 jiwa. Selain Kabupaten Sampang, daerah lain yang tergolong mempunyai penduduk miskin cukup banyak adalah Kabupaten Malang dengan penduduk miskin sebanyak 488.117 jiwa, semudian disusul oleh Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bangkalan. Masing-masing kabupaten tersebut mempunyai penduduk miskin sebanyak 398.117

jiwa, 391.426 jiwa, dan 336.317 jiwa. Sedangkan daerah yang mempunyai jumlah penduduk miskin paling sedikit adalah Kota Blitar, yaitu hanya sebesar 9.445 jiwa. Selain Kota Blitar daerah lain yang penduduk miskinnya relatif rendah adalah Kota Mojokerto, yaitu sebanyak 10.548 jiwa, kemudian disusul oleh Kota Madiun, Kota Batu, dan Kota Pasuruan. Ketiga kota tersebut masing-masing mempunyai jumlah penduduk miskin sebesar 10.844 jiwa, 14.980 jiwa, dan 18.421 jiwa.

Hasil analisis menunjukkan bahwa, daerah yang mempunyai prosentase penduduk miskin yang tergolong “sangat tinggi” ada lima daerah, yaitu Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bojonegoro.

Menurut Survei Sosial Daerah Jawa Timur Tahun 2010, menunjukkan bahwa penyebab rumah tangga miskin paling besar di Jawa Timur adalah “pendapatan yang rendah”. Pada tahun 2010 jumlah rumah tangga miskin yang disebabkan karena “pendapatan yang rendah” sebesar 3.738.758 rumah tangga.

Selain disebabkan karena “pendapatan yang rendah”, faktor lain yang menjadi penyebab rumah tangga miskin di Jawa Timur adalah “pendidikan kepala rumah tangga rendah”. Pada tahun 2010 jumlah rumah tangga miskin yang disebabkan karena “pendidikan kepala rumah tangga rendah” sebanyak 3,149,484 rumah tangga. Daerah paling banyak rumah tangga miskinnya yang disebabkan karena “pendidikan kepala rumah tangga rendah” adalah Kabupaten Jember sebanyak 197.654 rumah tangga. Sedangkan daerah yang mempunyai rumah tangga miskin disebabkan karena “pendidikan kepala rumah tangga rendah” paling sedikit adalah

daerah Kota Batu. Kota tersebut hanya mempunyai mempunyai rumah tangga miskin yang disebabkan karena “pendidikan kepala rumah tangga rendah” sebanyak 5,278 rumah tangga.

Penyebab rumah tangga miskin di wilayah Jawa Timur lebih banyak disebabkan karena faktor absolut atau kemiskinan absolut. Kondisi tersebut terlihat pada gambar di atas, dimana kemiskinan absolut, yang disebabkan karena faktor keturunan, jumlah tanggungan keluarga, dan pendapatan rendah pada tahun 2006 mencapai sebesar 59%, dan yang disebabkan karena faktor struktural pada tahun yang sama mencapai 35%. Sementara rumah tangga miskin yang disebabkan karena faktor musibah hanya sebesar 6%.

Pentingnya kelembagaan dalam upaya menangani dan menanggulangi kemiskinan, karena ada beberapa faktor yaitu: Pertama, banyaknya masalah kemiskinan yang tidak mudah untuk dipecahkan oleh hanya satu atau sekelompok orang seperti pelayanan kebutuhan pokok, pemberdayaan, pelatihan dan lain-lain; Kedua, kelembagaan dapat memberi kelanggengan (keberlanjutan) pada khususnya pada pemberdayaan masyarakat miskin untuk terus menerus mengembangkan dirinya seperti untuk mengembangkan keahlian penguasaan keterampilan dan teknologi; Ketiga, kelembagaan dapat mengorganisasi dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat termasuk pihak swasta untuk dapat berperan dalam pengentasan dan penanganan kemiskinan.

Upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dalam upayan pengentasan dan penanganan kemiskinan perlu dikaitkan dengan penguatan kelembagaan, seperti kelembagaan: ekonomi, pemasaran, pendanaan, pen-

didikan dan pelatihan serta penyuluhan sebagai wadah kegiatan. Penguatan kelembagaan diperlukan untuk menggerakkan upaya penyediaan dana sebagai modal usaha, perbaikan struktur pasar, pembangunan sarana pendukung dan penyediaan sarana penunjang, dan penerapan teknologi tepat guna. Oleh sebab itu peran kelembagaan pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan dan memegang peran sentral sebagai upaya stimulus pemberdayaan masyarakat. Bagian ini akan mengidentifikasi sebesar apa besar peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengentasan dan penanganan kemiskinan di daerahnya.

Setelah melakukan identifikasi dan analisis terhadap kapasitas kelembagaan masing-masing kabupaten/kota yang berkaitan dengan kemiskinan dengan menggunakan jumlah instansi, jumlah program, jumlah kegiatan, dan jumlah anggaran, maka diperoleh secara rata-rata seberapa besar kapasitas kelembagaan kabupaten dan kota yang ada di wilayah Jawa Timur dalam menangani kemiskinan.

Secara rata-rata di wilayah kabupaten kemiskinan ditunjang atau ditangani oleh 38.3% instansi, apabila dikaitkan dengan tingkat kemiskinan di wilayah kabupaten kapasitas tersebut sudah cukup, karena rata-rata tingkat kemiskinan di wilayah kabupaten hanya sekitar 27,1%..

Permasalahan kemiskinan merupakan *vicious circle* yang sangat sulit dicari ujung pangkalnya. Namun ada beberapa teori yang menyatakan bahwa untuk memecahkan rantai permasalahan tersebut adalah dengan memutuskan masalah pendidikan rendah. Miskin pendidikan akan berpengaruh terhadap kemiskinan pada aspek lainnya, seperti pada akses terhadap pekerjaan, politik dan pengambilan keputusan.

Perempuan yang tidak mempunyai sumberdaya pribadi berupa pendidikan dengan sendirinya akan sangat sulit untuk mengakses pekerjaan terutama di sektor formal yang relatif berupah tinggi. Wilayah pekerjaan mereka biasanya terbatas pada sektor informal yang berupah rendah seperti buruh kasar atau pembantu rumah tangga (Mafruhah, 2009).

Permasalahan dan langkah-langkah yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur dalam pengentasan kemiskinan yang diakibatkan lemahnya modal manusia ini sejalan dengan pemikiran Gilley (1992), yang menyatakan pengembangan manusia (*human development*) adalah pemantapan keterampilan dan kompetensi, dan peningkatan tingkah laku manusia dalam organisasi untuk kegunaan personal dan profesional (*individual development*), komitmen terhadap pemantapan profesi dalam organisasi (*career development*), dan peningkatan performa agar organisasi bisa lebih menguntungkan, lebih efisien, lebih efektif, dan memperbesar keuntungan (*organizational development*).

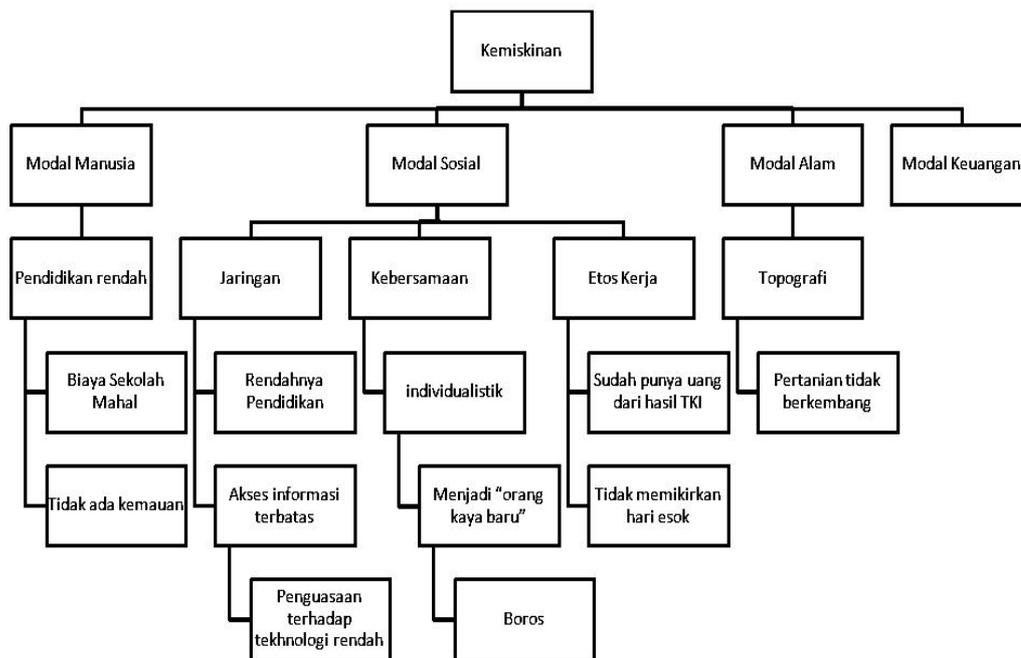
Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun demikian tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kemakmuran bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi setiap SDA yang dieksploitasi, Permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur yaitu proses peningkatan nilai tambah sumber daya alam masih terjadi di luar Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur dengan sumber daya alam yang cukup melimpah memiliki arti yang sangat strategis bagi penduduk

Jawa Timur, apalagi bagi masyarakat yang secara alami sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya alam. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam diarahkan untuk menumbuhkan industri berskala kecil guna meningkatkan usaha ekonomi rakyat, (termasuk industri rumah tangga) dan industri berskala menengah dengan memanfaatkan sumber daya lokal sebagai basis untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya industri disertai dengan pola pembinaan yang tepat. Dengan demikian mampu menarik industri hulu sampai industri hilir agar dapat mengolah bahan baku menjadi produk akhir yang bermutu dan memiliki nilai jual tinggi, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, serta membantu pembukaan lapangan kerja baru.

Dari diagram akar masalah pada gambar 1, yang dilakukan dengan masyarakat pesisir Madura dapat dijelaskan sebagai berikut: Kemiskinan di daerah pesisir disebabkan karena empat variabel, yaitu modal manusia, modal sosial, modal alam dan modal keuangan. Dimana modal manusia rendah dikarenakan pendidikan masyarakat pesisir yang rendah, hal ini disebabkan biaya sekolah yang mahal dan tidak adanya kemauan dari anak-anak masyarakat pesisir untuk melanjutkan sekolah. Alasan tidak ada kemauan melanjutkan sekolah ini diantaranya adalah jarak dari rumah warga ke sekolah yang terlalu jauh sehingga membuat anak-anak masyarakat pesisir malas berangkat sekolah.

Dari *indept interview* yang dilakukan, menurut warga daerah pegunungan Kota Batu ada banyak hal yang menjadi penyebab kemiskinan di daerah mereka. Bila



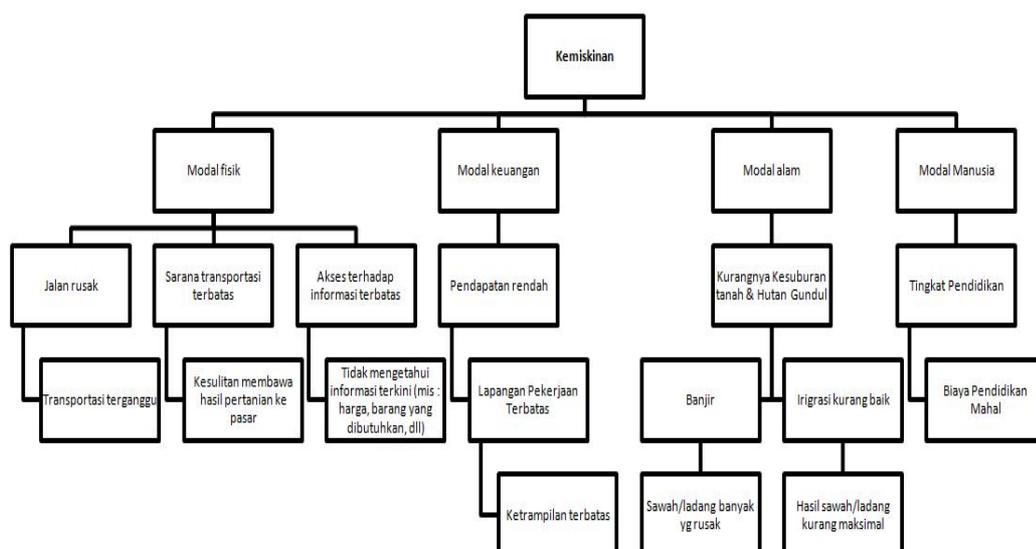
Gambar 1. Diagram Akar Masalah Daerah Pesisir Madura Berdasarkan Konsep ALMIRAL

mengacu pada pendekatan “ALMIRAL”, penyebab-penyebab kemiskinan tersebut dapat dikelompokkan dalam empat kelompok modal, yaitu modal keuangan, modal manusia, modal fisik dan modal alam.

Menurut tokoh masyarakat di daerah pegunungan Kota Batu, kemiskinan merupakan persoalan mikro, dimana salah satu bentuk penanggulangan kemiskinan yang cukup efektif adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya untuk penganggulangan kemiskinan. Beberapa infrastruktur dasar yang penting adalah keadaan jalan, sarana transportasi umum dan akses terhadap informasi, merupakan infrastruktur penting dalam memudahkan mobilitas manusia dan barang. Membangun suatu daerah memerlukan manusia yang handal dan hal itu hanya bisa diperoleh melalui penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Sebetulnya masih banyak lagi infrastruktur penting lain yang harus diperhatikan dalam membangun suatu daerah.

Menurut warga daerah pegunungan Kota Batu faktor alam juga turut mendukung semakin dalamnya jurang kemiskinan yang terjadi di daerah pegunungan. Jika menilik dari faktor alam warga daerah pegunungan menganggap bahwa kemiskinan yang terjadi di daerah mereka terutama disebabkan gundulnya hutan. Dari gundulnya hutan saja secara ekonomis menurut warga sudah merugikan mereka. Tidak hanya berdampak secara langsung, pengundulan hutan ternyata menurut warga juga berdampak tidak langsung terhadap irigasi. Irigasi seperti ini memang jadi kendala utama bagi pertanian daerah ini.

Penjelasan diagram akar masalah daerah pegunungan pada gambar 2 adalah sebagai berikut: Kemiskinan di daerah pegunungan disebabkan oleh modal fisik, modal keuangan, modal alam dan modal manusia. Modal fisik di daerah pegunungan disebabkan jalan yang rusak yang menyebabkan transportasi warga pegunungan terganggu, sarana transportasi yang terbatas, akses terhadap informasi yang terbatas. Modal keuangan disebabkan pendapatan rendah yang menyebabkan lapangan pekerjaan terbatas dan ketrampilan terbatas. Modal alam disebabkan kurangnya kesuburan tanah & hutan gundul yang menyebabkan banjir dan irigasi yang kurang baik. Modal manusia disebabkan tingkat pendidikan yang rendah yang menyebabkan biaya pendidikan mahal.



Gambar 2. Diagram Akar Masalah Daerah Pegunungan Kota Batu Berdasarkan Konsep “ALMIRAL”

batas sehingga menyulitkan masyarakat membawa hasil pertanian ke pasar dan akses terhadap informasi yang masih terbatas yang membuat masyarakat pegunungan tidak mengetahui informasi terkini (misalnya mengenai harga barang yang dibutuhkan dll). Keterbatasan informasi ini menyebabkan *assymetric information* sehingga pada dasarnya pemerintah sendiri tidak mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin daerah pegunungan.

Dari hasil analisa baik secara kuantitatif maupun kualitatif di dua daerah, pesisir dan pegunungan, permasalahan kemiskinan merupakan *vicious circle* yang sangat sulit dicari ujung pangkalnya. Tetapi masalah pendidikan merupakan kunci untuk memecahkan rantai permasalahan kemiskinan.

Penutup

Pendapat mengenai apa itu kemiskinan amat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, hingga pengertian lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral. Misalnya ada pendapat bahwa kemiskinan timbul karena adanya ketidakadilan dalam pemilikan faktor produksi; bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat; atau bahwa kemiskinan adalah ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplotasi.

Kemiskinan yang memadai harus mencakup pengertian kemiskinan yang memiliki berbagai dimensi, ternyata kemiskinan berwajah majemuk, berubah

dari waktu ke waktu, atau dari satu tempat ke tempat lain. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, papan); Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi); Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga); Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal; Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam; Tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial masyarakat; Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan; Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental; Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil)

DAFTAR PUSTAKA

- Blakely, Edward J. 1989. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. Sage Library of Social Research 168, Sage Publication.
- BPS. 1999. *Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Beberapa Dimensi Sosial Ekonominya 1996-1999*. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2005. *Statistik Indonesia 2005*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.
- Budi Soeradji, Mubyarto. 1998. *Gerakan Penanggulangan Kemiskinan: Laporan Penelitian di Daerah-Daerah*. Aditya Media. Yogyakarta.

- Fei, J. C. H., & Gustav, R. 1964. *Development Economics: What Next?*. In a. Ranis G, P, Schulta (Ed.), *The State of Development Economics*.
- Kuncoro, M. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan* (1st ed.). UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga. Jakarta.
- Mellor, J. W. 1976. *The New Economies of Growth: A Strategy for India and the Developing Countries*. Cornell University Press.
- SMERU Research Institute. 2001. *Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta
- Sharp, Ansel M., Charles A. Register, and Paul W. Cerimes. 1996. *Economics of Social Issues* (edisi ke 12). Richard D., Chicago: Irwin
- Sumarto, Sudarno. 2002. *Growth, Inequality, and Poverty: Evidence from Micro Data*. Makalah dalam The Young Economics Seminar. World Bank
- TKPK. 2007. *Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan*. Diambil dari <http://tkpkri.org/content/view/167/218/lang.id/>, tanggal 12 Pebruari 2008. Jakarta: Badan perencanaan Pembangunan nasional.